

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Indonesia merupakan negara yang telah merdeka 62 tahun silam. Setiap negara merdeka tentunya memiliki kedaulatan sendiri yang tidak boleh terpengaruhi oleh intervensi asing dalam mengambil setiap kebijakannya, baik di dalam maupun luar negeri. Indonesia juga merupakan negara yang memiliki posisi strategis di kawasan Asia Tenggara, sehingga banyak negara-negara asing yang melirik karena sumber daya alam yang dimiliki.

Indonesia juga merupakan negara yang mayoritas berpenduduk Muslim. Sejak lama Indonesia telah menjalin hubungan bilateral dengan berbagai negara di berbagai belahan dunia terutama dengan negara-negara Islam yang berada di Kawasan Timur Tengah. Iran contohnya, merupakan salah satu negara yang menjadi pilihan Indonesia untuk dijadikan negara sahabat dalam menjalin hubungan bilateral karena Iran sendiri memiliki posisi strategis di kawasan Timur Tengah dan memiliki banyak potensi alam yang perlu digali.

Awalnya, Iran bukanlah negara Islam. Namun, pada tahun 1979 di bawah pimpinan Ayatullah Khomeini, tercetuslah Revolusi Islam Iran. Kini Iran menjadi sebuah negara Islam dan merupakan negara yang memiliki potensi yang sangat besar dengan kekayaan alam yang dimiliki untuk memajukan peradaban Ummat Islam di masa mendatang.

Sekian lama Indonesia menjalin hubungan bilateral dengan Iran. Awal tahun 2005, Iran mulai mengembangkan Program Nuklirnya dengan tujuan damai yang telah lama direncanakan oleh pemerintah Iran. Pada tahun 2006, Iran meminta dukungan Indonesia atas program nuklirnya dengan tujuan damai yaitu untuk memenuhi segala kebutuhan energi nasional bahkan mungkin bisa menjadi inspirasi Indonesia untuk mengikuti langkah Iran. Di waktu itu pula, Indonesia dengan lantang menyerukan dukungan atas program nuklir Iran tersebut dengan tujuan damai.

Namun, Indonesia yang tampaknya memiliki “kedekatan” dengan pemerintah Iran. Pada 23 Maret 2007, Indonesia justru mendukung pengesahan resolusi mengenai sanksi tambahan bagi Iran yaitu dengan dikeluarkannya resolusi DK PBB no. 1747 tentang program nuklir Iran. Di sinilah banyak orang melihat ketidak konsistenan RI. Dukungan Indonesia terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1747 yang memberikan sanksi terhadap Iran telah menjadi kontroversi di dalam negeri. Pemerintah dianggap telah melukai Iran dan dianggap lebih memilih tunduk kepada kepentingan Barat.

Karena alasan itulah, penulis mencoba untuk membuat judul skripsi: *“Dukungan Pemerintah Indonesia terhadap Resolusi DK PBB No. 1747 Tentang Program Nuklir Iran”*. Penulis merasa sangat tertarik untuk

B. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) ini, penulis mempunyai beberapa tujuan:

1. Memberikan penjelasan (eksplanasi) mengenai Dukungan Pemerintah RI terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1747 tentang program Nuklir Iran.
2. Menganalisa sejauh mana kepentingan Indonesia atas dukungannya terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1747 setelah sebelumnya Indonesia menyerukan dukungannya terhadap program nuklir damai Iran.

Di samping itu juga, penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi Tugas Akhir (TA) dalam menyelesaikan Program Strata I pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai nuklir, orang seringkali membayangkan mengenai senjata, perang, bom dan korban yang berjatuhan. Namun ada sisi positif dari nuklir itu sendiri dalam kaitannya untuk meningkatkan peradaban manusia. Nuklir merupakan teknologi yang diharapkan mampu menggantikan minyak bumi sebagai tumpuan penyuplai energi bagi dunia di masa global. Efisiensi yang sangat tinggi serta cadangan uranium yang masih sangat

Pada dasarnya, setiap negara termasuk Iran berhak mendapat teknologi dan energi nuklir untuk tujuan damai tanpa diskriminasi. Karena itu, semua negara harus melaporkan dan menerima pengawasan IAEA (*International Atomic Energy Agency*) atas pengembangan energi nuklirnya untuk menjamin tidak ada proses pengolahan kembali dan pengayaan uranium yang dapat mengarah pembuatan senjata nuklir.

Penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai juga adalah hak semua orang termasuk rakyat dan bangsa Iran. Di sini Pemerintah Indonesia ingin mengembalikan hak itu pada pemiliknya, yaitu dengan mendukung Iran dalam program nuklirnya untuk tujuan damai berupa peningkatan energi, yang mungkin nanti bisa menjadi langkah awal Indonesia dalam menggunakan teknologi tersebut sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas di masa depan.

Indonesia-Iran telah lama menjalin hubungan bilateral, keduanya merupakan Negara sahabat. Iran adalah Negara Islam, dan Indonesia merupakan Negara mayoritas berpenduduk Muslim yang memiliki berbagai kekayaan alam dan memiliki banyak potensi yang perlu dikembangkan. Dalam mengembangkan peradaban, tentunya energi nuklir sangatlah dibutuhkan oleh setiap Negara termasuk Indonesia yang mendukung Iran mengembangkannya untuk tujuan damai dan kemajuan peradaban manusia.

RI pernah menyatakan dukungan atas program pengayaan nuklir Iran

Agung Laksono, dukungan tersebut di kemudian hari dapat saja berubah menjadi kerja sama antara Indonesia dan Iran dalam program pengembangan energi nuklir. Menurutnya, parlemen Indonesia akan tetap mendukung program nuklir Iran yang selama ini ditentang oleh sebagian besar negara Barat, sebab pengembangan nuklir untuk tujuan perdamaian yang dimaksud oleh Iran, akan digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan, pertanian, dan pembangkit tenaga listrik. Lebih lanjut beliau menegaskan, dalam kedepannya Indonesia pasti akan membutuhkan program tenaga nuklir, sebagai salah satu energi alternatif pengganti BBM. "Apabila diperlukan, saya akan minta kerja sama dengan Iran untuk pengembangan energi nuklir".¹

Pernyataan tersebut tentu disambut baik oleh Iran, mengingat Indonesia-Iran telah lama menjalin hubungan bilateral, sama-sama Negara Muslim dan Negara sahabat yang memiliki potensi yang cukup besar. Namun, sikap Indonesia tersebut tentu menuai reaksi di kancah Internasional, terutama AS yang tidak ingin kekuatannya merasa disaingi oleh kekuatan lain. Akhirnya AS pun sebagai Negara adidaya bereaksi keras atas sikap Iran dan sikap Indonesia dengan melobi DK PBB untuk dijadikan alat dalam mendesak Iran agar menghentikan program nuklirnya yang dinilai sangat berbahaya bagi mereka.

Sebagai salah satu negara yang menandatangani NPT dan sesuai ketentuan dalam traktat tersebut, Iran sesungguhnya memiliki hak untuk

¹ "DPR nyatakan Dukungan Program Nuklir Iran", Online, <http://www.eramuslim.com/berita/nas/6828132746-dpr-nyatakan-dukung-program-nuklir-iran.htm?rel>, diakses pada pukul 14.30 wib, tanggal 10 Agustus 2007.

menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Mestinya tindakan Iran itu tidak boleh dipersoalkan, apalagi faktanya ada sejumlah negara di Asia seperti India, Pakistan, Korea Utara dan Israel yang bahkan telah mengembangkan senjata nuklir.

Namun, kini program nuklir Iran menjadi polemik dan menjadi kekhawatiran dunia. Terutama AS sebagai Negara *Super Power* tentunya tidak ingin kepentingannya di Timur Tengah terganggu akibat aktifitas Nuklir Iran. Tanpa diduga sebelumnya, pemerintah RI yang awalnya mendukung program nuklir Iran, bersama 14 anggota DK PBB lainnya kini menyetujui Resolusi DK PBB No. 1747 yang dinotori AS tentang sanksi yang dijatuhkan kepada Iran. Mayoritas publik di Indonesia menginginkan keberpihakan terhadap Iran. Maka tidak heran jika keputusan Indonesia di kancah internasional itu menunai protes di dalam negeri. Arus protes terhadap sikap pemerintah pun mengalir deras dari berbagai kalangan, mulai dari lembaga negara, partai politik, organisasi massa. Bahkan sebagian besar anggota DPR menggunakan hak interpelasinya meminta keterangan dari pemerintah.

Langkah Pemerintah tersebut dinilai bertolak belakang dengan amanat konstitusi dasar RI. Bila resolusi itu meningkat hingga berbentuk invasi militer ke Iran, maka Pemerintah RI dianggap telah ikut andil mengacaukan perdamaian dunia. Di sinilah banyak kalangan menilai bahwa kebijakan Indonesia tersebut merupakan ketidak konsistenan RI dalam menjalankan politik luar Negeri. Sanksi PBB kepada Iran jelas akan berdampak besar bagi

D. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka penulis mencoba untuk membuat suatu rumusan masalah: *"Mengapa Pemerintah RI Menyetujui Resolusi DK PBB No. 1747 Tahun 2007, Padahal Tahun-tahun Sebelumnya Indonesia Mendukung Program Nuklir Iran?"*

E. Kerangka Berpikir

Di sini penulis mencoba untuk menggunakan beberapa kerangka berpikir yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam menjawab pertanyaan yang telah disusun pada rumusan masalah di atas. Kerangka berpikir yang penulis gunakan, yaitu:

1. Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri

Salah satu teori tentang pengambilan keputusan politik luar negeri dikemukakan oleh William D. Coplin, yang menyatakan:²

"To be interested in why states behave as they do interest area, we have to be interested in why their leaders make the decision. However, it would be mistake to think that foreign policy act may be viewed as the result of three board categories of considerations affecting the foreign policy decision maker state. The second is the economy and military capability of the state. The third is the international context the particular position in which his state finds it self especially in relation to other state in system."

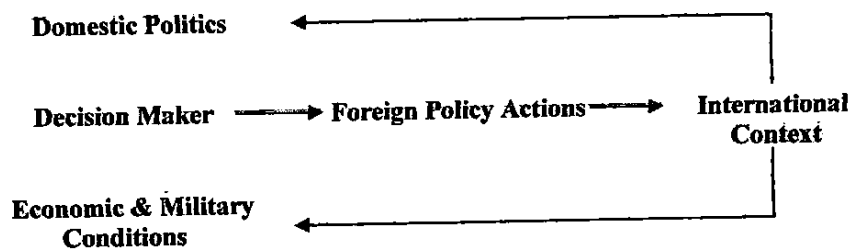
Menurut William D. Coplin ada tiga faktor yang melatar belakangi pembuatan keputusan luar negeri: (a) Kondisi politik dalam negeri di

² William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu telaahan teoritis*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1992), hal. 30

negara tersebut. Termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik di negara tersebut. (b) Kemampuan ekonomi dan militer suatu negara. (c) Konteks internasional (*International Context*), kondisi-kondisi internasional termasuk yang berbatasan dengan satu negara akan mendasari tindakan luar negeri dari negara tersebut.

Gambaran berikut mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor yang disebutkan tadi berinteraksi untuk menghasilkan tindakan politik luar negeri:

Gambar 1.1
Interaksi Antar Faktor Dalam Proses Pembuatan
Keputusan Politik Luar Negeri Menurut William D. Coplin



Sumber: William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu telaahan teoritis*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1992), hal. 30.

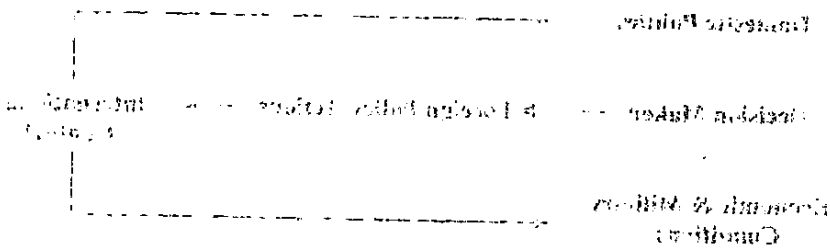
Dari bagan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi dukungan pemerintah Indonesia terhadap resolusi DK PBB No. 1747 tentang program nuklir Iran, adalah sebagai berikut:

a. Kondisi Politik dalam Negeri

Mengacu pada teori di atas, tidak ditemukan konteks politik dalam negeri (domestik) dalam penelitian ini.

(a) ...
 (b) ...
 (c) ...
 (d) ...
 (e) ...

(f) ...
 (g) ...
 (h) ...



...

...

...

...

...

b. Konteks Internasional

Senjata nuklir merupakan ancaman terhadap keamanan dunia dan secara moral tidak bisa dibenarkan keberadaannya. Karena itu, pada akhir tahun 1992 Indonesia mendukung perjanjian pelarangan penyebaran senjata nuklir (*Nuclear Non-Proliferation Treaty*) tahun 1968 demi menjaga keamanan dan perdamaian dunia.³

Alasan pertama yang disodorkan Dino Patti Djalal (Juru Bicara Presiden RI) mengapa Indonesia mendukung penjatuhan sanksi kepada Iran adalah pernyataan Badan Tenaga Atom Internasional, IAEA, yang belum mengkonfirmasi bahwa program nuklir Iran memang hanya untuk tujuan damai. Tepatnya dalam laporan terakhir El Baradei akhir Februari 2007 disebutkan soal itu. Akan tetapi, El Baradei juga menyatakan dengan lugas bahwa IAEA tidak menemukan Iran telah mengarahkan program nuklirnya untuk tujuan militer.⁴

Kemudian, karena pengembangan teknologi dan energi nuklir secara teknis bisa mengarah pada produksi senjata nuklir, maka setiap negara yang menyetujui NPT harus menerima verifikasi melalui *on-site inspection* oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), termasuk di antaranya Iran yang sedang mengembangkan program nuklirnya.

³ Edy Prasetyono. "Sikap Indonesia tentang Nuklir Iran". Online, [Http://www.csis.or.id/scholars_opinion_view.asp?op_id=606&id=35&tab=3](http://www.csis.or.id/scholars_opinion_view.asp?op_id=606&id=35&tab=3), diakses pada pukul 17.15, tanggal 12 Juni 2007.

⁴ "RI, DK PBB, dan Nuklir Iran", Online, [Http://www.indonesiavancouver.org/portal2/ff80808111e7db4a0111e8248d270021_da.html](http://www.indonesiavancouver.org/portal2/ff80808111e7db4a0111e8248d270021_da.html)

c. Kondisi Militer

Dalam konteks militer, Indonesia masih memiliki angkatan militer yang masih lemah dibanding AS sebagai negara adidaya. Anggaran Pertahanan yang masih minim menyebabkan TNI kesulitan dalam mempertahankan teritorialnya. Kekurangsiapan peralatan militer tersebut menjadi kelemahan TNI dalam menanggulangi berbagai permasalahan termasuk Sebagian besar senjata dan peralatan tempur TNI merupakan produk AS. Pemerintah Indonesia mengalami sejumlah kesulitan ketika penerapan embargo militer pernah dilakukan tahun 1999.⁵ Dari sisi personil, berdasarkan estimasi jumlah militer tidak lebih dari 300.000 personil. Jumlah ini sangat tidak sebanding dengan penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 275 juta jiwa. Persentase militer hanya mencapai 0,1 persen dibanding jumlah penduduk Indonesia.

Dalam hal ini, banyak peralatan militer Indonesia yang dibeli dari AS sudah lama dan perlu diganti. Akibatnya, banyak peralatan militer Indonesia tidak bisa digunakan lagi. Hal tersebut mengganggu kegiatan operasional pertahanan dan keamanan yang dilakukan militer Indonesia. Fakta ketergantungan militer Indonesia terhadap AS yang cukup tinggi membuat sejumlah upaya alternatif yang dilakukan pemerintah Indonesia tidak begitu signifikan dalam memodernisasi militer Indonesia.

⁵ Maeda Yoppy, *Militer Indonesia, Militer Kapitalistik, Pemilik Modal*, Online:

d. Kondisi Ekonomi

Sebagai negara yang sudah sejak lama menjalin hubungan bilateral, pengaruh kekuatan politik dan ekonomi AS terhadap Indonesia sudah merambah pada bermacam sendi kehidupan sosial politik. Tak hanya dalam bidang politik dan militer, dalam bidang perekonomian pun keterkaitan dengan AS sulit terhindarkan. Dalam bidang perdagangan misalnya, AS merupakan pasar teratas ekspor non-migas Indonesia.⁶

Lemahnya perekonomian Indonesia merupakan penyebab utama ketergantungan Indonesia terhadap akumulasi kapital. AS dalam hal ini negara yang selalu banyak mengambil keuntungan dari sektor perekonomian Indonesia. Sehingga walaupun Pemerintah mendapatkan keuntungan, namun tidak sebanding dengan akibat kerugian yang diderita. Walaupun demikian, karena ketergantungan tersebut akibat lemahnya perekonomian nasional, Indonesia masih memiliki prioritas mengejar berbagai tawaran dalam bentuk kebijakan ekonomi yang diberikan AS.

F. Hipotesa

Pemerintah Indonesia mendukung Resolusi DK PBB no. 1747 tahun 2007 padahal tahun-tahun sebelumnya Indonesia mendukung Program Nuklir damai Iran, karena:

⁶Budi H. Wibowo, "Di Balik Kunjungan Bush", Online:

1. Badan IAEA belum bisa menyimpulkan bahwa program nuklir Iran dimaksudkan untuk tujuan damai.
2. Kondisi Militer Indonesia masih lemah.
3. Kondisi Ekonomi dimana Indonesia masih mengejar berbagai tawaran dalam bentuk kebijakan ekonomi yang diberikan AS.

G. Jangkauan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan beberapa jangkauan atau ruang lingkup agar lebih terarah, yakni sejak Iran mengembangkan Teknologi Nuklir tahun 2005 sampai dukungan Indonesia terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1747 (24 Maret 2007) tentang Program Nuklir Iran. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan adanya pengambilan data yang terdapat di luar batas tahun yang telah ditetapkan apabila diperlukan dan ada relevansinya dengan penelitian ini.

H. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode Kepustakaan yaitu berupa pengumpulan data dan teori-teori meliputi buku-buku, literatur-literatur, jurnal-jurnal, majalah, internet, maupun dokumen-dokumen lainnya sebagai penunjang sumber informasi yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan dibagi dalam 5 (lima) bab, yakni:

Bab I berisi tentang alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Pada bab II, penulis menggambarkan Dinamika Politik Luar Negeri RI-Iran, Hubungan Diplomatik Indonesia-Iran, Hubungan Kerjasama Bilateral Kedua Negara, dan Dukungan Indonesia terhadap program Nuklir Iran.

Pada bab III, penulis menggambarkan dukungan pemerintah Indonesia terhadap resolusi DK PBB no. 1747, posisi Indonesia dalam keanggotaan tidak tetap DK PBB.

Pada bab IV, penulis membahas faktor-faktor yang melatar belakangi dukungan Indonesia terhadap resolusi DK PBB no. 1747, konteks internasional, kondisi militer dan kondisi ekonomi.

Pada bab V, penulis memberikan penegasan argumen yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dalam bentuk kesimpulan, temuan akademik, posisi tema yang diteliti dalam studi Hubungan Internasional, dan sumbangan terhadap studi Hubungan Internasional